

DAFTAR PUSTAKA

A. Dasar Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokom Agraria (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 960
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambana
Lembaran Negara Nomor 3888)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 130)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak
Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan
dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 13)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang tentang Perlindungan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
147)

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22)

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326)

Peraturan Menteri Kehutanan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/menhut-II/2014 tentang tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1187)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583)

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 11/Menhut-II/2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PJPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak

Surat Edaran Nomor:SE-14/VI-BPPH/2014 tentang Kewajiban Penerapan
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

B. Buku

Ali. A, Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya, Bogor:
Ghalia Indonesia, 2005

Ali. Z, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ali. Z, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amiruddin. et.al, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja
Grafindo Persada, Jakarta.

Barr, C., Dermawan, A., Purnomo, H. dan Komarudin, H. 2011, *Tata
Kelola Keuangan dan Dana Reboisasi Selama Periode Soeharto dan
Pasca Soeharto, 1989-2009: Suatu Analisis Ekonomi Politik tentang
Pembelajaran untuk REDD+*. Occasional Paper 60. CIFOR, Bogor,
Indonesia.

Fraser. A.I, 2002, *Making Foret Policy Work*, *Springers*, Netherlands.

Gane. M, 2007, *Forest Strategy: Strategic Management and Sustainable
Development for The Forest Sector*, Springer, The Netherlands.

Hardjono. P,M, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.

Harsono. B, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan
Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya,
Djambatan*, Jakarta.

- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- James W. Ely, JR., 2008, *The Guardian of every Other Right : A Constitutional History of Property Right*, Oxford University Press, New York.
- Khakim. A, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- L.J van Apeldoorn, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Malthus. T.R, 1798, *First Edday on Populatoon*, Areprint in Facsimile of An Essay on The Principle of Population, As It Affects The Future Improvement Of society, Palgrave Macmillan, New York
- Marzuki. P.M, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta..
- Muhammad. A, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Murhaini. S, 2011, *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Nurrochmat. D. R, 2005, *Strategi Pengelolaan Hutan Upaya Menyelamatkan Rimba Yang Tersisa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prajudi. A, 1988, *Hukum Administrasi Negar*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Raharjo. S, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung

- Ralf Michaels, *Legal Culture*, Forthcoming in *Handbook of european Private Law* (Basedow, Hopt, Zimmermann eds., Oxford University Press)
- Redi. A, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosadi. O, 2012 *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Salim, H.S. 2006, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Samosir D., 2013, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, CV Nuansa Aulia, Bandung.
- Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soekanto. S, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- Soekanto. S. dan Mamudji. S, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudjito, 2017, *Kehutanan: Analisis dan Refleksi Yuridis-Filosofis Problema Kehutanan di Indonesia*, Dialektika, Yogyakarta.
- Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriadi. B. E, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Winata F. H, *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum Jakarta: Komisi Hukum Nasional*, 2012

Zain A.S 1997, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

C. Makalah dan Jurnal

A.H. Darmawan, et,al, 2012, SVLK, *Jalan Menuju REDD+, Forest Governance dan Multistakeholder Forestry Programme*, Jakarta.

Ankers T.T. dan K.Ruppert K, 2006, *Defending the Polygon: The Emerging Human Right to Communal Property*, 59 Oklahoma Law Review Vol. 681.

Badan Pembinaan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011, *Laporan akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Pembalakan Liar Hutan (Illegal Logging)*.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM, 2015, *Laporan Akhir Tim analisa dan Evaluasai Kehutanan*
Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air BAPPENAS, 2014, *Peran Sektor Kehutanan Dalam Pembangunan Nasional dan Regional: Mencari Jalan Terbaik Membangkitkan Kontribusi Sektor Kehutanan Sebagai Motor Pembangunan Nasional dan Regional*.

Erwiningsih. Winahyu, *Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Menurut UUD 1945*, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009.

- FWI/GFW. 2001. *Keadaan Hutan Indonesia, Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia and Washington D.C.: Global Forest Watch.*
- FWI/GFW, 2014, *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013 Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia and Washington D.C.: Global Forest Watch*
- Haryati Dwi, et al, *Penerapan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Pelayanan Satu Pintu*, Mimbar Hukum, Volume 24, Nomor 2, Juni 2012.
- Human Right Watch, 2009, *Wild Money, The Human Right Consequences of Illegal logging and Coruption in Indonesia's Forestry Sector, United States of America.*
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018.*
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Mencegah Kerugian engara Di Sektor Kehutanan, Sebuah Kajian Tentang Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Dan Penatausahaan Kayu.*
- Muhdar M, dan Hardjasoemantri. K, *Aspek Pertanggungjawaban Hulum Atas Terjadinya Kebakaran Hutandan Akibat yang Ditimbulkan*, Sosiohumanika 14 (3) September 2001.
- Nasution. A, P.H,2013, *Pengaturan Perizinan Surat Keterangan Asal Usul Hasi Hutan Kayu Jati di Desa Semoyo, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Prov. D.I. Yogyakarta, Skripsi UGM.*

- Nelken. D, *Using The Concept of Legal Culture*, Australian Journal of Legal Philosophy, 2004
- Resosurdarmo B.P et.al, *Illegal Fishing War: An Environmental Policy during the Jokowi Era?*, Journal of Southeast Asian Economies, Vol. 35, No. 3, Special Issue: The Indonesian Economy in Transition: Policy Challenges in the Jokowi Era and Beyond (Part II), December 2018
- Sabila A.W, et.al, *Implementasi Program pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Desa Hutan (Studi Kerjasama Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan Dengan Masyarakat Desa Hutan Bate Kabupaten Tuban)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 12.
- Sitorus R., *Hak Penguasaan Atas Tanah Dalam Kawasan Hutan (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Uji Materi Atas UU Nomor 41 Tahun 1999)*, Jurnal Saintech vol. 06- No.02-Juni 2014.
- Sulistiowati, *Penerapan Lisesnsi dalam Pemberian Izin Penyelenggaraan Layanan Publik*, Mimbar Hukum volume 24, Nomor 3, Oktober 2012.
- Sumantri. A.S, *HPH dalam Hubungannya dengan Kelestarian Hutan Sebagai Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 10, Nomor 3, 1980.